



Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketersediaan Air Bersih Menuju Pencapaian *Sustainable Development Goals* (Sdgs) Dalam Pendekatan Ekonomi Islam (Studi Kasus: Dak Air Minum Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo)

Devi Rahmawati¹, Nurida Isnaeni², Paulina Lubis³

¹ Universitas Jambi

Article Info

Article history:

Received Aug 11th, 2023

Revised Aug 20th, 2024

Accepted Aug 22th, 2024

Keyword:

Kepuasan
DAK Air Minum
Sustainable Development Goals
Ekonomi Islam

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada SDGs poin ke-6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih yang berkelanjutan dilihat berdasarkan sudut pandang Islam (Studi kasus: DAK Air Minum Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo). Guna meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas air bersih yang layak, Dinas PUPR melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) membangun fasilitas air bersih. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manfaat dan kendala masyarakat terhadap Program DAK Air Minum, mengetahui kendala serta strategi BPSPAMS dalam pengelolaan Program DAK Air. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dilakukan wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program air bersih di Desa Teluk Singkawang telah terlaksana dengan baik, masyarakat memanfaatkan penuh program tersebut, terdapat beberapa kendala terkait kerusakan dan pembayaran namun telah teratasi dengan bijak, nilai kepuasan juga mempertimbangkan kehalalan, ketidakborosan, dan menghindari riba sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.



© 2024 The Authors. Published by UNJA.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Devi Rahmawati
Universitas Jambi
Email: devi1118rahma@gmail.com

Pendahuluan

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diresmikan pada rapat umum negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan 17 tujuan pada tahun 2015, salah satunya termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 terkait pembangunan infrastruktur, yakni memberikan pelayanan terbaik terkait air minum untuk seluruh masyarakat Indonesia, mengentas permukiman kumuh perkotaan, serta meningkatnya sanitasi layak akses penduduk menjadi 100% . Hal tersebut terdapat pada tujuan SDGs poin ke-6 yaitu memastikan ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Target dalam tujuan poin 6 ini telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang sejalan dengan RPJMN, berikut merupakan target global SDGs poin 6:

1. Pada 2030, mencapai pemerataan akses air minum secara universal.
2. Pada 2030, mencapai keadilan terhadap akses sanitasi dan kebersihan yang memadai, mengakhiri BAB sembarangan, memberi perhatian khusus pada kebutuhan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan.
3. Pada 2030, meningkatkan kualitas air dengan meminimalisir polusi, mengurangi emisi bahan kimia dan zat berbahaya lainnya, mengurangi proporsi air limbah yang tidak diolah serta peningkatan secara signifikan daur ulang yang aman di tingkat global.
4. Pada 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di berbagai kalangan serta menjamin penarikan dan pasokan air bersih yang berkelanjutan agar tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kelangkaan air.
5. Pada 2030, melaksanakan pengelolaan sumber air yang terintegrasi dan jika perlu melakukan kerja sama lintas-negara.
6. Target 6:
 - a. Pada 2030, memperluas kerja sama internasional dan mendukung kegiatan dan program terkait air dan sanitasi negara berkembang.
 - b. Peningkatan pengelolaan air dan sanitasi melalui dukungan dan partisipasi yang kuat dari masyarakat lokal.

Persentase rumah tangga yang mempunyai layanan air minum layak ialah hasil banding antara rumah tangga yang mempunyai akses air minum layak dengan keseluruhan rumah tangga yang ditetapkan dengan satuan persen (%). Sehubungan lokasi penelitian yang dipilih merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, maka berikut adalah data persentase sumber air minum layak rumah tangga Provinsi Jambi.

Tabel 1. Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak Provinsi Jambi Per Kabupaten Tahun 2015-2019

| Wilayah | Tahun | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Kota Sungai Penuh | 86,08 | 84,83 | 92,91 | 88,67 | 89,44 |
| Kerinci | 62,33 | 61,42 | 63,10 | 68,64 | 66,24 |
| Muaro Jambi | 58,83 | 63,51 | 53,71 | 56,55 | 70,30 |
| Kota Jambi | 88,83 | 84,91 | 86,51 | 85,17 | 91,43 |
| Bungo | 49,79 | 58,56 | 62,80 | 61,74 | 71,19 |
| Tanjung Jabung Timur | 88,90 | 91,79 | 91,69 | 92,38 | 32,78 |
| Tanjung Jabung Barat | 83,15 | 86,93 | 91,56 | 88,33 | 40,67 |
| Merangin | 38,59 | 37,50 | 41,56 | 49,17 | 46,06 |
| Sarolangun | 48,91 | 41,42 | 58,88 | 48,98 | 53,83 |
| Tebo | 50,11 | 56,13 | 54,37 | 57,90 | 57,33 |

| | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Batanghari | 42,08 | 34,34 | 41,77 | 47,74 | 57,97 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dari data tabel 1 di atas dapat dibedakan menjadi beberapa klaster, mulai dari kabupaten dengan tingkat persentase akses rumah tangga terhadap air minum layak meningkat, menurun serta ada yang pergerakannya tidak signifikan. Kabupaten Tebo termasuk salah satu klaster kabupaten dengan pergerakan tingkat persentase yang tidak signifikan. Sumber daya air di Kabupaten Tebo telah dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah Air Minum. Tujuannya agar tercapai pelayanan kebutuhan air bersih. Namun masih ada beberapa wilayah yang belum mendapat fasilitas dan pelayanan kebutuhan air bersih. Sebagaimana dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban terkait dengan penyediaan air minum dan sanitasi. Terdapat pula dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Maka dari itu, telah dilaksanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Dana Alokasi Khusus Fisik Sub Bidang Air Minum (DAK Air Minum) oleh Dinas PUPR.

Adapun desa yang menjadi studi kasus pada penelitian ini adalah Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Pemilihan lokasi penelitian ini dilihat dari segi tenaga, dana, dan waktu akan lebih efisien serta sebagai bentuk sumbangsih dan rasa peduli terhadap daerah sehingga nantinya daerah tersebut dapat menjadi daerah dengan infrastruktur yang memadai. Di lokasi tersebut penulis dapat melihat bagaimana respon masyarakat terhadap program sehingga bisa diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap program tersebut, penulis telah melakukan observasi awal sehingga penulis lebih mengetahui karakteristik wilayah tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait manfaat dan kendala masyarakat, kendala BPSPAMS dalam pengelolaan dan solusinya terhadap program DAK Air Minum di Desa Teluk Singkawang.

Tinjauan Pustaka

Kepuasan

Menurut Handi (2002) kepuasan merupakan suatu persepsi atas produk maupun jasa yang telah memenuhi harapan. Selain itu, kepuasan konsumen merupakan hasil perasaan dari dalam diri konsumen setelah menggunakan produk atau jasa (Ruslim & Rahardjo, 2016).

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, diantaranya (Lupiyoadi, 2001):

1. Kualitas produk
Pelanggan akan merasa puas apabila produk yang mereka gunakan memiliki kualitas yang baik. Kualitas produk meliputi penampilan produk, aroma, rasa, dan kegunaan.
2. Biaya/Tarif
Produk dengan kualitas memadai dengan tawaran harga dan biaya, meliputi harga produk dan biaya-biaya penanganan lainnya.
3. Kualitas pelayanan
Konsumen akan merasa puas apabila mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan harapan. Kualitas pelayanan meliputi ketepatan waktu, kepedulian, sikap dalam menghadapi konsumen, ketepatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi Islam, kepuasan seorang muslim disebut qona'ah. Kepuasan seseorang tercermin secara lahir dan batin. Kepuasan juga terkait dengan keimanan yang melahirkan rasa syukur dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: barang atau jasa yang dikonsumsi halal, konsumsi yang tidak berlebihan, dan tidak mengandung riba. Oleh karena itu, kepuasan seorang

muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas seberapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsinya.

Air Bersih

Air bersih adalah air yang dapat diminum dan memiliki kualitas baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air bersih merupakan air yang syaratnya telah terpenuhi dalam sistem penyedia air minum. Persyaratan yang dimaksud adalah mulai segi kualitas air dilihat dari kualitas fisik, kimia, biologi dan radiologis, sehingga tidak menimbulkan efek samping apabila dikonsumsi (Ketentuan Umum Permenkes No. 416/Menkes/PER/IX/1990) (Lestari, 2016).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan ke daerah-daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus milik daerah sesuai dengan prioritas nasional yang berasal dari dana APBN. Dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAK termasuk dalam bagian dari dana perimbangan (Adami, 2016).

Beberapa faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhak untuk menerima DAK adalah (Siagan, 2018):

1. Daerah tertinggal
2. Pembangunan yang tidak merata
3. Angka pengangguran

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Fisik yang dimaksud meliputi bidang (Perpres, 2018):

1. Pendidikan;
2. Kesehatan dan keluarga berencana;
3. Perumahan dan pemukiman;
4. Pertanian;
5. Kelautan dan perikanan;
6. Industri kecil dan menengah;
7. Pariwisata;
8. Jalan;
9. Irigasi;
10. Air minum;
11. Sanitasi;
12. Pasar;
13. Energi skala kecil;
14. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
15. Transportasi.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah diresmikan pada rapat umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015 dengan 17 tujuan. Tujuan ini disusun sebagaimana Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang sudah berjalan sejak tahun 2000 hingga 2015. Hal ini diharapkan dapat memandu tercapainya tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2030 kelak. Yang mana kita ketahui bahwa SDGs memiliki 17 tujuan diantaranya (United cities and local government, n.d.):



Gambar 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SDGs poin 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan pembangunan berkelanjutan poin 6 adalah “Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk semua”. Tujuannya memastikan semua kalangan mendapat akses terhadap air bersih dan sanitasi. Target dalam tujuan poin 6 ini telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang sejalan dengan RPJMN (Komnasham, 2016):

Tabel 2 Target Global dan Nasional SDGs Poin 6

| Target Global | Target Nasional |
|--|--|
| 6.1 Pada 2030, mencapai pemerataan akses air minum secara <i>universal</i> . | 1. Peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi layak yang berkelanjutan. |
| 6.2 Pada 2030, mencapai keadilan terhadap akses sanitasi dan kebersihan yang memadai, mengakhiri BAB sembarangan, memberi perhatian khusus pada kebutuhan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan. | 1. Meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. 2. Meningkatkan pelaksanaan promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat. |
| 6.3 Pada 2030, meningkatkan kualitas air dengan meminimalisir polusi, mengurangi emisi bahan kimia dan zat berbahaya lainnya, mengurangi proporsi air limbah yang tidak diolah serta peningkatan secara signifikan daur ulang yang aman di tingkat global. | 1. Sistem infrastruktur limbah perkotaan terkonsentrasi pada 438 kota/kabupaten; 2. Penyediaan air baku untuk rumah tangga, perkotaan dan industri. |
| 6.4 Pada 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di berbagai kalangan serta menjamin penarikan dan pasokan air bersih yang berkelanjutan agar tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kelangkaan air. | 1. Memperbaiki kondisi dan fungsi tampungan air dan sumber air lainnya. |
| 6.5 Pada 2030, melaksanakan pengelolaan sumber air yang terintegrasi dan jika perlu melakukan kerja sama lintas-negara. | 1. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga air (PLTA); 2. Ketersediaan sarana dan prasarana irigasi; 1.1. Meningkatkan upaya restorasi dan konservasi untuk meminimalkan lahan tak produktif dalam mendukung daerah aliran |

| | |
|---|--|
| | sungai/DAS serta perlindungan air untuk bantaran sungai prioritas. |
| | 1.2. Menyediakan sarana dan prasana irigasi |
| 6.a Pada 2030, memperluas kerja sama internasional dan mendukung kegiatan dan program terkait air dan sanitasi negara berkembang. | 1. Peningkatan pengelolaan air dan sanitasi melalui peningkatan anggaran APBN. |
| 6.b Peningkatan pengelolaan air dan sanitasi melalui dukungan dan partisipasi yang kuat dari masyarakat lokal. | Tidak tersedia. |

Sumber: Komnasham, 2016

Sustainable Development Goals (SDGs) poin 6 dalam Perspektif Islam

Air dalam pandangan Islam digunakan umat muslim sebagai sarana dalam mensucikan diri dari hadats dan najis agar mendapat kesempurnaan dalam beribadah (Humaida et al., 2020). Penyediaan air diutamakan untuk keberlangsungan hidup generasi mendatang dengan upaya pelestarian alam dan mencegah kerusakan. Hal ini merupakan upaya dalam pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan kedepannya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 9:

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar” [QS. An-Nisa(4): 9].

Keberadaan air sangat diperlukan untuk keletarian makhluk hidup sebagaimana firman Allah QS. Al-An'am ayat 99:

Artinya: “Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman” [QS. Al-An'am (6): 99]

Fiqh Bi'ah (Fiqh Lingkungan)

Fiqh lingkungan (*fiqh bi'ah*) membahas tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidup untuk menciptakan kemaslahatan penduduk bumi dan mencegah kerusakan berdasarkan ketentuan Islam dengan dalil terperinci. Maka dari itu yang dimaksud fiqh lingkungan di sini adalah ilmu syar'i tentang problematika lingkungan atau untuk melakukan kritik atas sikap eksploitasi manusia terhadap lingkungan (Istiani & Purwanto, 2019). Kondisi inilah yang sering menyebabkan kerusakan alam sebagaimana Firman Allah dalam beberapa ayat di bawah ini:

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” [QS. Ar-rum (30): 41]

Adapun cakupan permasalahan objek kajian dalam fiqh lingkungan pada dasarnya sebagai berikut (Istiani & Purwanto, 2019):

1. Mengetahui bagian dari alam
2. Mengelola sumber daya alam agar tercipta manfaat yang berkelanjutan dari generasi ke generasi

3. Pemulihan lingkungan yang sudah rusak serta pelestarian flora dan fauna.

Ekonomi Pembangunan Islam

Perbedaan pembangunan konvensional serta pembangunan Islam terletak pada *worldview* dalam pengembangan ekonomi merupakan ilmu sekaligus implementasi kebijakan. Perbedaan elemen-elemen penting berimplikasi sistematis pada turunannya dalam perekonomian seperti referensi, tema, tujuan, prosedur, dan strategi penerapan. Berdasarkan perbedaan antara paradigma ekonomi pembangunan konvensional dengan ekonomi pembangunan Islam, beberapa argumen pendukung yang dapat ditarik untuk menjelaskan mengapa keberadaan ekonomi pembangunan Islam itu penting.

1. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan
2. Aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat yang Islami
3. Aspek pemenuhan motivasi ekonomi masyarakat yang Islami

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian yang sifatnya mendalam, mengikuti proses, dilakukan sendiri oleh peneliti. Desain deskriptif kualitatif ini bersifat mendalam pada sasaran, untuk menjelaskan fakta kejadian yang diteliti agar penulis dapat lebih mudah mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap program pengadaan air bersih DAK Air Minum.

Penelitian dilakukan di mana Program Penyediaan Air Minum (DAK Air Minum) berdiri, tepatnya di Dusun Margodadi, Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pencari sumber data langsung dari lokasi penelitian. Data Primer merupakan suatu data yang diambil langsung dari sumbernya. Data primer didapat melalui observasi serta wawancara kepada masyarakat Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Data sekunder merupakan data yang didapat dari instansi terkait dan merupakan hasil olahan dari instansi itu sendiri. Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Tebo

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara terstruktur kepada beberapa informan yang dapat memberikan informasi secara rinci serta dokumentasi. Analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu reduksi, display, dan verifikasi (Parsih, 2020):

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
Reduksi data menekan peneliti untuk fokus pada data yang hendak diambil oleh peneliti. Tahap ini berjalan mulai dari dibuatnya pertanyaan penelitian sampai data terkumpul.
2. Penyajian Data (*Data Display*)
Setelah tahap reduksi, maka selanjutnya adalah tahap penyajian data, baik dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Tujuannya untuk mempermudah dalam memahami hal yang telah terjadi serta dapat membuat rencana kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)
Tahap selanjutnya adalah tahap kesimpulan. Kesimpulan awal yang dipaparkan bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak memiliki bukti pendukung. Namun, jika telah didukung bukti yang valid, maka kesimpulan sudah dikatakan kredibel.

Pembahasan dan Hasil

Manfaat dan kendala masyarakat terhadap Program DAK Air Minum

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tentang pembangunan infrastruktur, yakni memberikan pelayanan terbaik terkait air minum untuk seluruh masyarakat Indonesia, mengentas permukiman kumuh perkotaan, serta meningkatnya sanitasi layak akses penduduk menjadi 100% . Hal tersebut juga terdapat pada tujuan SDGs poin ke-6 yaitu memastikan ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan (Kamulyan, 2018).

Dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban terkait dengan penyediaan air minum dan sanitasi. Terdapat pula dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (PUPR, 2016).

Untuk dapat melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap program SPAM yang mana pada penelitian ini SPAM berasal dari DAK air minum, maka perlu dilakukan kegiatan wawancara kepada masyarakat sebagai konsumen terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, diantaranya (Lupiyoadi, 2001):

1. Kualitas produk

Pelanggan akan merasa puas apabila produk yang mereka gunakan memiliki kualitas yang baik. Kualitas produk dapat meliputi penampilan produk, aroma, rasa, dan kegunaan. Dari wawancara yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

“Tingkat kejernihan air pam ini standar, sama seperti kejernihan air pada umumnya serta kejernihan air tidak dipengaruhi oleh musim. Hanya saja pada saat tertentu air pam ini menjadi sedikit keruh yakni setelah terjadi pemadaman listrik dengan waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan menara air dan pipa kering, ketika listrik kembali menyala maka air yang melalui pipa-pipa jaringan akan mengangkat endapan-endapan yang ada. Tidak ada aroma dan bau tertentu, hanya saja pada awal hidup setelah terjadi pemadaman listrik yang cukup lama terdapat sedikit bau tanah dari endapan, hal itu terjadi sementara waktu. Masyarakat memanfaatkan air pam ini untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi, siram-menyiram, dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat menggunakan air pam ini untuk dikonsumsi, tidak ada rasa yang mengganjal ketika dikonsumsi. Namun ada juga masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan air sumur maupun air isi ulang untuk dikonsumsi”.

2. Biaya/Tarif

Produk dengan kualitas memadai dengan tawaran harga dan biaya, meliputi harga produk dan biaya-biaya penanganan lainnya. Dari wawancara yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

“Biaya beban air pam senilai Rp. 2.000,-/bulan/meter kubik, nilai ini dikatakan standar bagi pengelola dan tidak membebankan masyarakat. Biaya ini ringan sekali jika dibandingkan dengan tarif PDAM pada umumnya yang dapat mencapai Rp.10.000 – Rp. 20.000/meter kubik”.

3. Kualitas pelayanan

Konsumen akan merasa puas apabila mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan harapan. Kualitas pelayanan meliputi ketepatan waktu, kepedulian, sikap dalam menghadapi konsumen, ketepatan kerja. Dari pemaparan tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

“Dikarenakan masyarakat tidak begitu memiliki kendala, maka kepedulian pengelola dapat dilihat dari kerutinan pengelola dalam melakukan pengecekan amper saluran rumah setiap bulannya. Pengelola bersikap baik kepada konsumen dan memperlihatkan kedisiplinannya dalam hal penagihan tarif bulanan serta apabila terjadi kerusakan dan ada laporan kerusakan, maka sebisa mungkin akan ditangani dengan segera. Pengaduan

keluhan dapat dilakukan masyarakat melalui panggilan telepon maupun bertemu secara langsung dengan pengelola, namun langkah lebih baik jika diberikan layanan kotak saran untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan keluhan dan masukan tanpa diketahui identitasnya”.

Kendala BPSPAMS dalam pengelolaan program DAK air minum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Margono selaku ketua Satlak dan BPSPAMS terkait pengelolaan DAK air minum Desa Teluk Singkawang sebagai berikut:

“Kendala akan tetap ada walaupun itu merupakan permasalahan yang kecil. Kerusakan ringan yang terjadi seperti masalah saluran pada kran dan amper/spedometer. Kerusakan saluran pipa jalur/utama bisa saja terjadi akibat kecelakaan kecil seperti terlindas mobil dan penggalian. Pengelola mengantisipasi jika terjadi kerusakan yang besar seperti kerusakan pompa. Juga alat otomatis yang digunakan untuk mengendalikan persediaan air mudah sekali rusak dan sudah beberapa kali diganti. Kemudian untuk penagihan biaya bulanan kepada masyarakat yang jarang berada di rumah, pengelola akan melakukan tagihan beberapa kali ke rumah agar masyarakat melakukan pembayaran”.

Strategi yang dapat dilaksanakan BPSPAMS untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan DAK Air Minum

Berdasarkan dari pemaparan Kepala Desa dan Sekertaris Desa, untuk pengelolaan program ini sendiri akan dibentuk Peraturan Desa (Perdes) sehingga kedepannya terdapat acuan-acuan baku terkait pengelolaan DAK Air Minum. Dari hasil wawancara kepada pengelola, dapat ditarik kesimpulan atau verifikasi terkait strategi mengatasi kendala dalam pengelolaan program SPAM:

“Untuk masalah pelayanan ketika memang emergency seperti pipa saluran utama pecah itu harus segera ditangani. Ketika pengelola mengetahui laporan kerusakan maka segera mungkin akan ditangani, jika tidak maka pengelola yang mengalami kerugian, karena air tetap keluar, listrik tetap terpakai tetapi tidak ada pemasukan. Untuk pembayaran masih bisa dikatakan selalu tepat waktu. Untuk penambahan jaringan, hal ini pernah disampaikan kembali ke dinas PUPR dan ternyata mereka berkenan memberikan tambahan dana namun tidak sepenuhnya, masih diperlukan dana swadaya agar bisa mencukupi penyambungan, dikarenakan dana dusun sudah digunakan untuk perbaikan parit, dana desa juga tidak mencukupi sebab saat ini hanya ada 40% dana untuk alokasi fisik dan masih digunakan untuk keperluan lainnya. Kalau untuk permasalahan air yang kurang jernih, ini hanya permasalahan sementara yang akan berubah dengan sendirinya karena selama ini kejernihan air berkurang hanya saat setelah terjadi pemadaman listrik dengan waktu yang cukup lama. Pengurusan tempat penampungan persediaan air juga sering dilakukan. Dikarenakan alat otomatis sering mengalami kerusakan, maka saat ini dilakukan penghidupan secara manual dan terjadwal agar persediaan air tetap ada”.

Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketersediaan Air Bersih Menuju Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Pendekatan Ekonomi Islam

Sebagai sistem hidup yang universal, Islam memberikan solusi dari berbagai persoalan hidup manusia secara holistik atas dasar nilai kandungan Al Qur'an dan Hadits untuk keseimbangan antara dunia dan akhirat. Begitu pula dengan alam, penyediaan air diutamakan untuk keberlangsungan hidup generasi mendatang dengan upaya pelestarian alam dan mencegah kerusakan.

Kepuasan seseorang tercermin secara lahir dan batin. Kepuasan juga terkait dengan keimanan yang melahirkan rasa syukur dengan mempertimbangkan barang atau jasa yang dikonsumsi adalah halal, konsumsi yang tidak berlebih, dan tidak mengandung riba. Oleh karena itu, kepuasan seorang muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas seberapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari apa yang dikonsumsi.

Adapun ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yakni tauhid, 'adl, akhlak, keseimbangan, dan kebebasan individu.

Air adalah sesuatu yang sangat serius dalam Islam, karena kita tahu air adalah kebutuhan vital bagi manusia. Begitu pentingnya air menurut Islam, kitab-kitab Fiqih menempatkan air dalam pembahasan utama. Bab air (Bab Thaharah) dalam kitab fiqh selalu ditempatkan di bab pertama. Namun untuk saat sekarang dan masa yang akan datang permasalahan air dalam Islam harus lebih menjadi perhatian (Absori et al., 2018).

Berikut merupakan kedudukan dan pentingnya air dalam Islam, urgensi air dalam Al-Qur'an:

1. Alam ini sangat berkepentingan dengan air
2. Air sebagai sumber kehidupan
3. Pasokan air adalah tetap, dan oleh karena itu, harus dikelola karena pasokan tidak dapat ditingkatkan
4. Pemanfaatan dan Pelestarian sumber daya kelautan
5. Air tidak boleh disia-siakan karena diperlukan oleh seluruh makhluk
6. Syarat Ibadah (Thaharah)
7. Hujan, air mancur, dan sungai merupakan simbol Kasih Sayang Allah SWT kepada umat manusia

Urgensi Air dalam Hadits:

1. Larangan mencemari air
2. Larangan berlebihan memakai air
3. Air sebagai barang publik

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fikih Air adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap *hifzul miyah* حفظ المياه (menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya air) sebagai tujuan untuk mewujudkan kemashlahatan dan menjauhkan kerusakan.

Untuk itu telah dilakukan wawancara kepada masyarakat terkait kepuasan terhadap program SPAM DAK Air Minum. Kepuasan seseorang tercermin secara lahir dan batin. Kepuasan juga terkait dengan keimanan yang melahirkan rasa syukur dengan mempertimbangkan kehalalan, ketidak borosan, dan menghindari riba sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Mengingat hal tersebut, maka menurut masyarakat kejernihan air pam ini standar, masyarakat memanfaatkan air pam ini untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi, siram-menyiram, dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat menggunakan air pam ini untuk dikonsumsi, tidak ada rasa yang mengganjal ketika dikonsumsi. Namun ada juga masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan air sumur maupun air isi ulang untuk dikonsumsi. Biaya beban air pam ini senilai Rp. 2.000,-/bulan/meter kubik, nilai itu dikatakan standar dan bisa dibilang ringan dibandingkan tarif PDAM pada umumnya, masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang baik dari pengelola serta tindakan yang cekatan dari pengelola. Tentunya program ini sangat membantu masyarakat ketika kesulitan air di musim kemarau dan juga mengurangi beban tagihan listrik akibat pompa sumur.

Hal yang demikian merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mencapai kemashlahatan. Kemaslahatan dapat terwujud dalam tiga tingkatan salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan dharuriyat. kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut alSyatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk saat sekarang dan yang akan datang maka mestinya konsep tentang *hifzul miyah* حفظ المياه (menjaga, melindungi dan mengelola

sumber daya air) 5 menjadi pokok Maqashid al-Syari'ah (مقاصد الشريعة) yang masuk katagori kebutuhan dharuriyat (primer).

Pentingnya peran negara dalam perekonomian terutama dalam menjaga dan mengelola sumber daya yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak termasuk didalamnya *hifzul miyah* حفظ المياه (menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya air) dapat kita pahami dari pendapat para ulama, salah satunya menurut ;Imam Al-Mawar diperpendapat bahwa ada sepuluh daftar kewajiban negara (khalifah) yaitu:

1. Menjaga tegaknya keimanan (akidah Islamiyyah) masyarakat dengan mencegah masuknya pemikiran kufur di tengah mereka.
2. Melaksanakan dan menjaga keadilan.
3. Menjamin keamanan kehidupan dan hak milik warga di bawah pemerintahannya.
4. Mengawasi pelaksanaan hukuman.
5. Melaksanakan garis perbatasan yang layak dan dengan kekuatan cukup.
6. Mengorganisasi jihad dalam melawan siapa saja yang menolak ajaranIslam tentang keadilan.
7. Mengorganisasi barang rampasan dan orang-orang miskin, menurutpetunjuk syariah.
8. Menyehatkan keuangan pemerintah.
9. Memilih orang-orang untuk menjadi pejabat hukum berdasar seleksikompetensi dan loyalitasnya.
10. Melakukan pengawasan langsung terhadap urusan publik.

Kesimpulan

Program SPAM yang telah dilaksanakan di Desa Teluk Singkawang dinyatakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan biaya ringan dan pelayanan yang baik tanda merasakan kendala yang berlebih.

Pengelola DAK Air Minum menyampaikan bahwa setiap program sudah dipastikan memiliki kendala sekecil apapun. Seperti kerusakan saluran rumah, kran, amper, saluran pipa utama, kerusakan alat otomatis, bahkan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan mesim pompa air.

Untuk mengatasiya pengelola memberikan pelayanan yang baik dan cekatan pada setiap keluhan, serta telah menyampaikan terkait penambahan jaringan kepada dinas PUPR dan pihak tersebut berkenan untuk memberikan tambahan dana namun tidak sepenuhnya, masih membutuhkan dana swadaya agar dapat mencukupi penyambungan. Untuk alat otomatis yang sering rusak, pengelola memutuskan untuk menghidupkan secara manual dan terjadwal agar persediaan air tetap ada.

Daftar Pustaka

- Abdi, S., & Utomo, S. (2019). *Sistem Pelayanan Air Bersih Di Perumahan Pucang Gading Dalam. 2018, 978–979.*
- Absori, A., Elviandri, E., & Farkhani, F. (2018). *Fiqh Miyah; Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Konteks Maqashid Al-Syari'Ah. 1.* <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/68557>
- Adami, M. (2016). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Simeulue.*
- Ari, M. (Universitas I. N. S. T. S. J. (2020). *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Layanan Air Bersih Di Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo.*

- Badan Pusat Statistik. (2021a). *Indikator Air Bersih dan Sanitasi*.
- Badan Pusat Statistik. (2021b). *Persentase air Minum Layak Provinsi Jambi 2015-2019*.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Desa Sasaran Pamsimas*.
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta.
- Fauziah, A. (Universitas S. U. (2021). *Prinsip kerjasama internasional terkait program air bersih (fresh water) di indonesia dalam mendukung tercapainya sustainable development goals/sdgs*.
- Hammound, M. (Islam oundation). (1990). *Environment, Ecology and Islam*.
- Humaida, N., Aula, M., Nida, N. H., Islam, U., & Antasari, N. (2020). *Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dalam perspektif islam*. 18(1), 131–154. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3483>
- Insani, S. (universitas N. Y. (2015). *Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Temanggung*. 1–12.
- Istiani, M., & Purwanto, M. R. (2019). *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-qur'an*. 1, 27–44.
- Juniatmoko, R. (Stikes B. H. M. M., & Erikania, S. (Stikes B. H. M. M. (2020). *Penyediaan Air bersih Berbasis Masyarakat Sebagai Aktualisasi SDGs di Kabupaten Madiun*. 5, 91–100.
- Kamulyan, P. (2018). *Evaluasi Keberlanjutan Pengelolaan Sstem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Di Kota Blitar*.
- Komnasham. (2016). *Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua Target Nasional terkait Air dan Sanitasi*. 11, 1–8.
- Lestari, D. (Universitas N. S. (2016). *Kontribusi Program PAMSIMAS Terhadap Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Tingkat Rumah Tangga Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan*.
- Lupiyoadi, R. (2001). *Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktik* (Edisi Empat). salemba Empat.
- Mujiono, A. (UPP A. (2005). *Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan* (1st ed.).
- Muttofi'ah. (2020a). *Efektivitas program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) (Studi kasus Desa Sei Toman Kecamatan Mendahara Ulu)*.
- Muttofi'ah. (2020b). *Efektivitas program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) (studi kasus sei Toman Kecamatan Mendahara Ulu)*.
- Nalvin, Wilinny, Chandra, W., Akbar, F., & Hutabarat, M. (2021). *Analisis Kepuasan Kerja Karyawan di Yayasan Paramita Foundation Medan Tahun 2021*. 436–438.
- Parsih, F. (Universitas I. N. S. J. (2020). *Implementasi Enterpreneurship Dan Enterpreneur Dalam Keberhasilan Usaha Roti Ridho Di Kota Jambi*.
- Perpres. (2018a). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik*.
- Perpres. (2018b). *Perturan Presiden No 5*.
- Pratama, R. K., & Hendrakusumah, E. (2019). *Memastikan Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Di Kelurahan Cipaganti Menuju Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Ensuring the Availability and Management of Clean Water and Sustainable Sanitation in Cipagant*. 578–585.

- PUPR. (2016). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI*.
- Ramelina, A. S., Candrasari, A., Prastyo, Y., Ichsan, B., (Kedokteran, F., & Surakarta, U. M. S. (2021). *Kepuasan Pasien BPJS Terhadap Perilaku Petugas PUSKESMA di Sukoharjo*. 1072–1090.
- RPJM, D. T. S. (n.d.). *RPJM Desa Teluk Singkawang*.
- Ruslim, T. S., & Rahardjo, M. (2016). *Identifikasi Kepuasan Konsumen Ditinjau Dari Segi Harga Dan Kualitas Pada Restoran Abuba Di Greenville*. 2, 51–65.
- Siagan, E. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2010-2016*.
- Suryani, A. S. (2020). *Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi saat Pandemi Covid-19 Clean Water and Sanitation Development during the Covid-19 Pandemic Pendahuluan*. 11(2), 199–214. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1757>
- United cities and local goverment. (n.d.). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang perlu diketahui oleh pemerintah daerah*.
- Wandira, A. G. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*.